



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1. <i>RADAR BANTEN</i>	4. <i>SATELIT NEWS</i> ✓	JANUARI	08	MEI	SEPTEMBER	2024
2. <i>BANTEN POS</i>	5. <i>BANTEN RAYA</i>	FEBRUARI		JUNI	OKTOBER	
3. <i>KABAR BANTEN</i>	6.	MARET		JULI	NOVEMBER	
		APRIL		AGUSTUS	DESEMBER	

DPRD Banten Beri Empat Rekomendasi

Terkait LHP BPK Tahun Anggaran 2023

SATELITNEWS, SERANG— DPRD Provinsi Banten memberikan empat catatan rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Banten pada tahun anggaran 2023. Dewan menekankan jika keempat rekomendasi itu harus menjadi bahan evaluasi Pemprov di tahun berikutnya,

khususnya dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Hal tersebut diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten, Hilmi Fuad pada saat rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan DPRD Banten, terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2023, Selasa (7/5). Hilmi

BACA HAL 8



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS ✓
2.	BANTEN POS	5.	BANTEN RAYA
3.	KABAR BANTEN	6.	

JANUARI	08	MEI	SEPTEMBER	2024
FEBRUARI		JUNI	OKTOBER	
MARET		JULI	NOVEMBER	
APRIL		AGUSTUS	DESEMBER	

BPK Temukan Penggunaan Dana BOS Tak Sesuai Ketentuan

■ DPRD...

Sambungan dari hal 1

melanjutkan, keempat catatan rekomendasi itu yakni Pemprov perlu lebih meningkatkan lagi sistem pelaporan dan program keuangan daerah melalui skema peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Lalu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga agar lebih cermat mengevaluasi, mengklasifikasi belanja atas usulan anggaran kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA).

“Selanjutnya Pemprov juga harus mempedomani, mengklasifikasi belanja dalam mengajukan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Terakhir, lanjut Hilmi, terkait dengan temuan BPK terhadap penggunaan dana BOS, badan anggaran Banggar meminta Kepala Dindikbud Banten agar lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dana BOS.

“DPRD Banten merekomendasikan kepada pemprov untuk segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK itu,” pungkasnya.

Pj Gubernur Banten Al Muk-

tabar mengatakan, pihaknya memerintahkan kepada seluruh kepala OPD untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit dan strategis dalam mengupayakan tidak lanjut atas rekomendasi LKPJ Tahun anggaran 2023 dari BPK RI.

“Tindak lanjut itu harus dilakukan secara menyeluruh sebelum batas waktu yang ditentukan,” ucapnya.

Secara komprehensif, lanjutnya, rekomendasi DPRD Provinsi Banten itu merupakan niat dan keinginan bersama masyarakat Banten. Karena pada akhirnya sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Pihaknya juga telah menindaklanjuti rekomendasi itu. Beberapa hal teknis masih dalam rentang waktu tindak lanjut.

“Kita berkomitmen untuk melaksanakan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2023 dengan beberapa temuan yang meliputi sektor pendapatan, penggunaan dana BOS, realisasi belanja modal, dan pengelolaan aset.

Pada sisi pendapatan, BPK menemukan permasalahan pada pengelolaan Pajak Air Permukaan yang belum optimal, antara lain terdapat perusahaan yang memanfaatkan air permukaan namun belum memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIP-PA) dan belum memiliki NPW-PD.

Temuan selanjutnya, untuk penggunaan dana BOS pada terjadi pada lima satuan pendidikan tidak sesuai ketentuan. Untuk realisasi belanja modal terjadi pada gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan tidak seluruhnya sesuai spesifikasi kontrak. Terakhir BPK menyebutkan pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa, juga mendorong agar Dindikbud Provinsi Banten segera melakukan koordinasi kepada sekolah yang menjadi temuan BPK itu untuk bisa segera ditindaklanjuti temuannya.

“Kita dibatasi oleh waktu, makanya terus kita dorong agar secepatnya itu dilakukan,” pungkasnya. (luthfi/mardiana/gatot)



**KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**